

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Peradilan Etik dan etika konstitusi; perspektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said, 2007, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harijanti, Susi Dwi, 2015, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta.

- H.R, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 2000, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2014, *Tantangan Pers Indonesia*, Dewan Pers, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2015, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2015, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Mubaroq, Zaki, 2013, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Panggabean, Henry P., 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Poerbopranoto, Koencoro, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2018, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Rajawali Pers, Depok.
- Rengka, Frans J., 2015, *Dialog Hukum dan Keadilan*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PresSindo, Yogyakarta.
- Saleh, *et al*, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sardini, Nur Hidayat, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, LP2AB, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung.
- Sulastomo, 2001, *Demokrasi atau Democrazy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunny, Ismail, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Supriyanto, Didik, *et al*, 2012, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Tjahjadi, S.P. Lili, 1991, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta.

Tricahyono, Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang.

Wardani, Kunthi Dyah, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Wijaya, Endra, 2011, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PKIH FHUP, Jakarta.

Artikel Jurnal

Asshiddiqie, Jimly, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 2, no. 1, 3 Desember 2019.

Chakim, M. Lutfi, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik" *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

Darwis, Muh. Salman, "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

Feka, Mikhael, "Problematika Kode Etik Dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020". *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.

Furqon, Eki, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 Juni 2020.

Hadjon, Philipus M., "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1

Handayani, Dwi, "Kajian Filosofis Prinsip *Audi Et Alteram Partem* Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Nomor 2, 2020.

Heryansyah, Despan, "Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum UAD*, Vol. 8. Nomor 1, 2017.

Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 37, Nomor 2, Desember 2021.

Janwar Hippy, Sudarsono dan Istislam, “Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, *Jambura Law Review*, JALREV Volume 2 (1): 48-64, 2020.

Nugroho, Heru, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM*, vol. 1, no. 1, Mei 2012.

Rishan, Idul, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol 9 (1), 092-111, 2017.

Riza, Dola, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, 2018.

Sulastri, “Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT), *Jurnal Wasaka Critical Law Review*, Vol. 1, Nomor 1, 2 September 2020.

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Wahyunadi, Yodi Martono, “Disertasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2016): 147

Wicaksono, Dian Agung, Dedy Kurniawan, dan Bimo Fajar Hantoro, "Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, no. 3 (2020): 367

Makalah

Asshidiqie, Jimly “Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum”, Makalah, Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Fadjar, Abdul Mukthie, “Permasalahan Penegakan Hukum Pemilihan Umum: Antara Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu dan Perselisihan Pemilu”, Makalah, Seminar Nasional Penegakan Hukum Pemilu, Malang, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, “Pengadilan Khusus,” Makalah, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Internet

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 Wujud Nyata DKPP Mengawal Integritas Penyelenggaraan Pemilu” <https://dkpp.go.id/laporan-kinerja-dkpp-tahun-2019-wujud-nyata-dkpp-mengawal-integritas-penyelenggaraan-pemilu/>, diakses tanggal 1 Juni 2021.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020, Mengawal Integritas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi” <https://dkpp.go.id/laporan-kinerja-dkpp-tahun-2020-mengawal-integritas-penyelenggaraan-pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi/>, diakses 2 Mei 2021.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Sejarah DKPP”, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses 22 Januari 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu”, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200720-024134-1131.pdf, diakses 8 April 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri & Menteri Hukum dan HAM (Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu)”, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181010-054257-7946.pdf, diakses 5 April 2022.

Gloria, Reyn, “Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, diakses 22 Januari 2021.

Komisi Pemilihan Umum, “Pemilu Dalam Sejarah”, <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah> diakses 25 Maret 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), tanggal 18 Maret 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 / PUU-IX / 2011, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), tanggal 4 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, perihal pengujian Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), tanggal 03 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) , tanggal 19 Mei 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, tanggal 26 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), tanggal 29 Maret 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/TUN/2014, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 210 / Kpts / KPU- Prov-014 / Tahun 2012 - tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dan Putusan DKPP Nomor 27 / DKPP – PKE - I / 2012, tanggal 06 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 3908 / KPU- Prov-002 / 2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atas nama Khairul Anwar, SH., tanggal 08 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani, ST, S.H., tanggal 25 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Mulkan Siregar, SH., tanggal 2 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 68/Kpts/KPU Prov-031/TAHUN 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan Memberhentikan dari Jabatannya BAMBANG HERMANTO, SPI. Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa Jabatan 2013-2018, tanggal 19 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan atas nama Robert Cenedy, SP., tanggal 3 September 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 September 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1481/kpts/kpu-prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., tanggal 29 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 83 / KPTS / KPU.PROV.030 / 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E., tanggal 11 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/TUN/2015, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, (khusus atas nama Drs.Arifuddin,M.Pd.), tanggal 19 November 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/TUN/2015, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/kpts/kpu-prov- 002/ 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2016, perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, tanggal 21 April 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70K/TUN/2016, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 2014, tanggal 21 April 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/TUN/2016, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU- Prov-014/2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., tanggal 23 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2016, perihal gugatan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 052-KEP Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., tanggal 5 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/TUN/2017, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:

67/Kpts/KPU-Prov-025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 18 Nopember 2014, atas nama Armin, S.Ag. M.Ag., tanggal 24 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/TUN/2017, perihal gugatan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara No: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 8 Maret 2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 PK/TUN/2017, perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No: 26/KPTS/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 13 Desember 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 21 November 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 108/G/2014/PTUN.Mks., perihal gugatan Keputusan KPU Kab Sidenreng Rappang Syamsul Alam, tanggal 3 September 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 109/G/2012/PTUN-BDG. perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/XI/2012, tanggal 5 November 2012 tentang Pemberhentian Muhammad Hasan, S.Sos., sebagai Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 2008-2013, tanggal 30 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 215/G/2012/PTUN-JKT. Perihal gugatan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.23/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 21 November 2012 tentang Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian Tetap Selaku Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Puncak Provinsi Papua Atas Nama Nas Labene, tanggal 27 Pebruari 2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2013/PTUN-JKT, perihal gugatan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 712-KEP Tahun 2012, tanggal 16 November 2012 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Ramdansyah, tanggal 24 April 2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2013/PTUN-JKT, perihal gugatan Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKEII/ 2013, tanggal 25 Juli 2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 13/G/2014/PTUN.BKL., perihal gugatan Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov-007/2014, tanggal 03 Februari 2014, Tentang Pemberhentian atas nama Titin Sumarni, S.Ip, M.Pd sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018, tanggal 3 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 06 / G / 2014 / PTUN.JPR. perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 83/KPTS/KPU.PR.V.030/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Yoseph Wenda, S.Th, tanggal 04 November 2014.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2014/PTUN-JKT, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2383/Kpts/KPU-Prov-002/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/G/2014/PTUN-BKL, perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 51/Kpts/KPUProv- 007/2014, tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas nama M. SALEH. S.Ag,MM., tanggal 18 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/2014/PTUN.JKT, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 570/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, tanggal 5 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT, perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau., 27 September 2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 33/G/2016/PTUN-Pbr, perihal gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 16 Mei 2016 Nomor 43/Kpts/KPU-PROV-004/Tahun 2016 tentang

Rehabilitasi Nama Baik terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 7 Desember 2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN.JPR, perihal gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Dan Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang, tanggal 24 Agustus 2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 57/G/2018/PTUN.BNA, perihal gugatan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh Nomor: 138/K.AC/TU.00.001/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP Atas Nama Jufrizal, tanggal 9 April 2019

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2019/PTUN-JKT, perihal gugatan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019, tanggal 13 Juni 2019.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT., perihal gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Juli 2020.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT, perihal gugatan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314PKEDKPP/X/2019, tanggal 12 Pebruari 2020, tanggal 7 September 2020.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT, perihal gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023, tanggal 30 Nopember 2020

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2021/PTUN-JKT, perihal gugatan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0373/K.BAWASLU/HK.01.01/XI/2020, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Muh. Adamsyah Usman, tanggal 2 Juni 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2021/PTUN-JKT., perihan gugatan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0452/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2018-2023 Atas Nama Rahman Ismail, tertanggal 22 Desember 2020 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0210/HK.01.00/K1/02/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023 Atas Nama Aljunaid Bakari, tanggal 21 Juli 2021.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 9/DKPP-PKE-I/2012, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Muhammad Hasan, S.Sos., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode Tahun 2008 sampai dengan 2013, tanggal 17 Oktober 2012.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 23/DKPP-PKE-I/2012, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 21 November 2012.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27/ DKPP – PKE - I / 2012, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, tanggal 28 November 2012.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 31 Oktober 2012.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 136/DKPP-PKE/II/2013 dan 137/ DKPP-PKE/II/2013, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2013.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 01 /DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, tanggal 30 Januari 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 12 / DKPP –PKE - III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Setitit dan Sdr Yoseph Wenda, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Tolikara, tanggal 04 Maret 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 44/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Karimun, tanggal 23 Mei 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 70/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, tanggal 4 Juni 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 49/DKPPPKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, tanggal 9 Juni 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 67/DKPP-PKEIII/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, tanggal 9 Juni 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 65/DKPP-PKE.-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 9 Juni 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 9 Juni 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 141/DKPP-PKE-III/2014 dan 164/DKPP-PKE/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, tanggal 6 September 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 133/DKPP-PKE-III/2014 dan 182/DKPP-PKE-III/2024, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, tanggal 10 September 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor DKPP No. 199/DKPP-PKE-III/2014 dan 200/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 10 September 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 271/ DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 10 September 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 215/DKPPPKE-III/2014 dan 216/DKPPPKE-III/2014, 217/DKPPPKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 25 September 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 290/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar, tanggal 11 November 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 308/DKPPPKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang tanggal 11 November 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 309/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 11 November 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, tanggal 11 November 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 281/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 21 November 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 9 Desember 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar, tanggal 17 November 2015.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 dan 328/DKPP-PKEIII/ 2014, perihal pengaduan pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Desember 2014.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 4 Mei 2016.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 8 Juni 2017.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123/DKPP-PKE-VII/2018, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya, tanggal 15 Agustus 2018.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, tanggal 10 April 2019.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Subang, tanggal 12 Pebruari 2020.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKEDKPP/X/2019, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Maret 2020.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 55-PKEDKPP/V/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 29 Juli 2020.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 109-PKE-DKPP/X/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai serta Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 4 November 2020.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 114-PKE-DKPP/X/2020, perihal pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Utara, tanggal 16 Desember 2020.